



DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN

# LKIP TAHUN 2024

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA BEKASI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah menyelesaikan kinerjanya pada Tahun 2024. Selanjutnya capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Rencana Strategis 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan ini, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan kami, untuk itu kami mohon saran perbaikan atas kekurangan tersebut, agar menjadi motivasi bagi penyempurnaan penyusunan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menggambarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama sebagai bahan penyusunan LKIP Kota Bekasi Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2024 yang akan disampaikan Wali Kota kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB.

Bekasi, Januari 2025

Herbert S W Panjaitan  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2024 – 2026. Laporan ini berisi perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola perencanaan kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis serta 8 (delapan) program. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2024 mencapai tingkat persentase **(96,92%)**, Menjaga Stabilitas Harga Komoditas pada tahun 2024 mencapai tingkat persentase **(320.8%)**, serta Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan pada tahun 2024 mencapai tingkat persentase sebesar **(100%)**. Sementara itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar **(139,57%)**. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dapat dinyatakan berhasil.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, maka dilaksanakan evaluasi terhadap program-program dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....		i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....		ii
DAFTAR ISI .....		iv
DAFTAR TABEL.....		v
DAFTAR GAMBAR.....		vii
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Aspek Strategis Organisasi .....	9
	1.3 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	12
	1.4 Sistematika Penyajian .....	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA .....	16
	2.1 Rencana Strategis .....	16
	2.2 Perjanjian Kinerja 2024 .....	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	25
	3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	27
	3.3 Realisasi Anggaran .....	62
	3.4 Analisis Realisasi Anggaran DKPPP Tahun 2024.....	65
BAB IV	PENUTUP .....	68
	4.1 Kesimpulan.....	68
	4.2 Rencana Tindak.....	68

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2024

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendidikan Pegawai DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024.....	10
Tabel 1.2	Data Pendidikan Pegawai TKK DKPPP Kota Bekasi tahun 2024 .....	10
Tabel 1.3	Jumlah Kendaraan pada DKPPP tahun 2024.....	11
Tabel 1.4	Peralatan Kantor pada DKPPP tahun 2024.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran DKPPP.....	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DKPPP Kota Bekasi .....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024 .....	21
Tabel 2.4	Alokasi Kegiatan Per Triwulan Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024.....	26
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja utama nilai LHE AKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2024.....	28
Tabel 3.3	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.4	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Target Renstra 2024- 2026.....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai (LHE) AKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2024 dengan tahun 2023 ...	30
Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat efisiensi .....	31
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau.....	33
Tabel 3.8	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau.....	34
Tabel 3.9	Data Stabilitas Haarga Pangan Beras Kota Bekasi Tahun 2024.....	35
Tabel 3.10	Skor PPH Konsumsi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Tahun 2024 .....	37
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan tahun 2024.....	38
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja indikator kinerja inflasi kelompok makanan minuman dan tembakautahun 2024 dan tahun 2025.....	39
Tabel 3.14	Analisis pencapaian IKU Peningkatan persentase konsumsi Rumah tangga sektor makanan tahun 2024.....	40
Tabel 3.15	Indikator Capaian pendukung indikator kinerja utama persentase peningkatan hasil produksi pertanian.....	41
Tabel 3.16	Analisis capaian indikator persentase penanganan kerawanan pangan kota bekasi tahun 2024 .....	42
Tabel 3.17	Persentase pengawasan pembinaan keamanan pangan pengujian PSAT dan olahan tahun 2024 .....	42
Tabel 3.18	Produksi ikan hias Kota Bekasi tahun 2024.....	43
Tabel 3.19	Produksi Ikan Konsumsi di Kota Bekasi Tahun 2024.. .....	45
Tabel 3.20	Produksi Unit Pengolahan Ikan di Kota Bekasi tahun 2024 .....	46
Tabel 3.22	Pencapaian Produksi Peternakan.....	49
Tabel 3.23	Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024 .....	49
Tabel 3.24	Pencapaian produksi olahan hasil peternakan tahun 2024 .....	50
Tabel 3.25	Jumlah produksi olahan hasil peternakantahun 2024.....	50
Tabel 3.26	Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosis .....	50
Tabel 3.27	Jumlah kasus penyakit hewan menular Kota Bekasi Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan perikanan Kota Bekasi .....	51
Tabel 3.28	Unit Usaha Peternakan Kesehatan hewan dan produk hewan Bersertifikat teknis di Kota Bekasi tahun 2024 .....	51
Tabel 3.29	Unit Usaha PKH yang bersertifikat teknis Kota Bekasi Tahun 2024 ...	51
Tabel 3.30	Unit usaha peternakan Kesehatan hewan dan produk hewan Bersertifikat teknis di Kota Bekasi Tahun 2024.....	54

Tabel 3.31 Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024 serta Efisiensi pengguna sumber daya untuk insikator kinerja .....	56
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Persentase konsumsi Rumah tangga sektor makanan tahun 2024 dengan tahun 2023. ....	61
Tabel 3.33 Realisasi belanja langsung urusan DKPPP tahun 2024 .....	63
Tabel 3.34 Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2024.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 .....	6
------------	---	---

# PENDAHULUAN

## I

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu Sub Sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk Meningkatkan Harkat, Martabat dan Memperkuat Jati Diri serta Kepribadian Masyarakat dalam Pendekatan Lokal, Nasional dan *Global*. Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Keseimbangan berbagai Aspek dalam Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*). Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam Usaha mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta Cita-cita Masyarakat dalam mencapai Masa Depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas dan Terukur, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara Berdaya Guna, Berhasil Guna serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*KKN*). Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap Kegiatan dan Hasil Akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara mulai dari Pejabatnya untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (*RENSTRA*) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada Atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas yang Berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas dan Media Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara Periodik dan Melembaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengamanatkan bahwa untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*),

berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berkelanjutan, diperlukan Manajemen Strategis yang menempatkan Organisasi pada Titik yang Strategis, sehingga akan diperoleh Prospek (*keuntungan/kemakmuran*), terutama untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

Penerapan Manajemen Strategis di Indonesia pada Sektor Publik, secara Formal diperkenalkan Tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan Perwujudan Kewajiban Instansi Bersangkutan untuk Mempertanggungjawabkan Keberhasilan ataupun Kegagalan Penyelenggaraan Misi Instansi meraih Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* Pasal 2 Ayat 1 *mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara Ringkas dan Lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBN/APBD*).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, diuraikan bahwa Laporan Kinerja merupakan Bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai Hasil Analisis terhadap Pengukuran Kinerja.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya. Pada akhirnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai Sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Seluruh Pemangku Kepentingan (*Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi*) atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Selain sebagai Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dan Pembangunan secara Baik dan Benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan yang Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang Akuntabel, sehingga dapat berperan secara Efisien, Efektif dan Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat dan Lingkungan yang Tenram, Tertib serta Kondusif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik dari Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama (*IKU*) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran 2024 yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (*RPD*) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 maupun Sasaran yang ada pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. IKU DKPPP Kota Bekasi yang *pertama* adalah ***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP.***

- Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi*;
2. IKU DKPPP Kota Bekasi yang *kedua* adalah ***Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau***. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu *Menjaga Stabilitas Harga Komoditas*;
  3. IKU DKPPP Kota Bekasi yang *ketiga* adalah ***Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan***. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga Sektor Makanan*.

Ketiga IKU ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran RENSTRA DKPPP Kota Bekasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan DKPPP Kota Bekasi.

Penetapan Sasaran Strategis dan IKU DKPPP Kota Bekasi tersebut untuk Menunjang Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026 yaitu *Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota terutama dalam Menunjang Pencapaian “Laju Pertumbuhan Ekonomi” serta Menunjang Ketercapaian “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”*.

Berdasarkan Latar Belakang ini, untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut secara Komprehensif mengenai Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 ini.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab terhadap Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan perikanan. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada Dinamika Pembangunan di Kota Bekasi, baik yang Berdimensi Lokal, Regional dan Nasional. Untuk mendukung semua itu, Seluruh Daya Upaya dilakukan

melalui Beragam Aspek, yaitu *Aspek Penguatan Integrasi, Aspek Sosialisasi, Aspek Pemerintahan Umum, dan Aspek Pembinaan Aparatur.*

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Adapun unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terdiri dari :

**A. Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. pembinaan administrasi perkantoran;
4. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang keuangan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
5. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
6. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. pemberian laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

**B. Sekretaris** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. pengoordinasian, pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; dan pengendalian
9. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
  1. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
  2. memformulasikan sajian untuk analisis;
  3. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
  4. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
  5. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  1. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
  2. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
  3. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris

Dinas;

4. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
  5. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
- c. **Analisis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda**, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengolahan dan analisis data PAD;
  - b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data Belanja Daerah.
  - c. Menganalisis permasalahan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
  - d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data Dana Dekonsentrasi.
  - e. Memberikan rekomendasi mengenai Rancangan APED dan Rancangan Perubahan APED.

**C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta data dan informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang KDP membawahkan :

1. **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**, mempunyai tugas :
  - a. mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
  - b. mengolah dan menganalisis data/informasi harga dan stok pangan;
  - c. mengolah dan menganalisis data/informasi prognosa neraca pangan;
  - d. mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;

**D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan untuk

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang KKP, membawahkan :

1. **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda, mempunyai tugas :

- a. mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan;
- b. menganalisis pola konsumsi pangan;
- c. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
- d. mengolah dan menganalisis data/informasi penganeekaragaman pangan;
- e. mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar;

2. **Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda.**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana; lokasi; budidaya; pengembangan usaha dan hasil pertanian; sosialisasi; bimbingan teknis; dan pendampingan);
- b. menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian);
- c. menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan;

**E. Bidang Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan serta hortikultura untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang pertanian, membawahkan:

1. **Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda;**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja pengawasan (sarana prasarana; lokasi; budidaya; pengembangan usaha dan hasil pertanian; sosialisasi; bimbingan teknis; dan pendampingan);
- b) menyusun rencana kerja pengujian (sarana dan mutu hasil pertanian);
- c) menyiapkan bahan, peralatan dan tempat pengujian sarana dan mutu hasil pertanian di lapangan;
- d) mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan;

2. **Penyuluh Pertanian Ahli Muda;**

Penyuluh pertanian ahli muda, mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan

- penyusunan program penyuluhan pertanian;
- b. melakukan diseminasi informasi pertanian; (teknis, sosial dan ekonomi) sesuai kebutuhan;
- c. melakukan evaluasi peningkatan dan akses pembiayaan fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran;

### 3. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda.

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, mempunyai tugas:

- a. melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
- b. menyusun rencana kerja pengawasan alat dan mesin pertanian;
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian untuk Melakukan pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan pemeriksaan alat dan mesin pertanian ditingkat penyedia/penerima untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;

**F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :

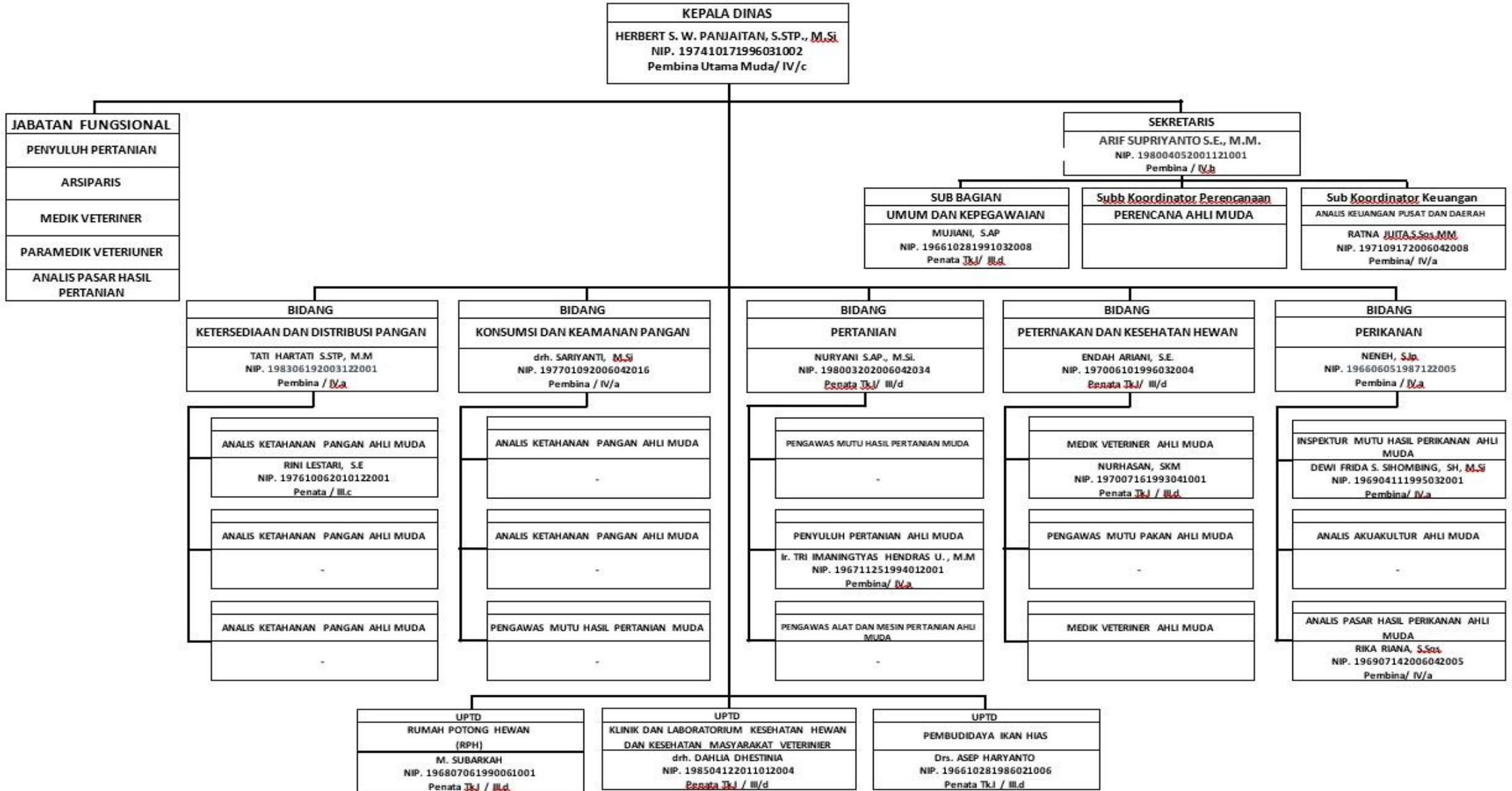
- a. Medik Veteriner Ahli Muda; mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
  - b. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;
  - c. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
  - d. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
- b. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda; mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan;
  - b. melakukan seleksi dan pendataan bibit/benih hijauan;
  - c. mengawasi proses produksi pakan (penyiapan, pemindahan, dan pengecilan ukuran partikel hijauan);

**G. Bidang Perikanan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Budidaya perikanan, Pemasaran olahan hasil perikanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Perikanan, membawahkan :

1. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda, mempunyai tugas :
  - a) mengolah data dalam rangka penyusunan rancangan teknis;
  - b) menyusun bahan pedoman/panduan teknis di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya.
  
2. Analis Akuakultur Ahli Muda, mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai anggota, yaitu menganalisis hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kegiatan/pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - b) melakukan penyusunan rancangan teknis di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai anggota, yaitu menganalisis hasil identifikasi bahan rancangan teknis di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - c) mengolah dan menganalisis kebutuhan/ pemanfaatan/kelayakan prasarana budidaya;
  
3. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengumpulan bahan rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
  - b. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
  - c. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai anggota.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**



## 1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang merupakan salah satu Wilayah Bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki Luas Wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha, dengan Batas Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara Astronomis, Wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan.

Wilayah Kota Bekasi berupa Daratan yang diapit oleh Wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi Potensi Daerah dan Arah Perkembangan Kota Bekasi.

Secara Administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Wilayah Kecamatan yaitu: Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara.

Kota Bekasi telah menjelma menjadi Kota Megapolitan yang mengandalkan Jasa dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Roda Perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan Urusan serta Kewenangan yang dimilikinya, DKPPP Kota Bekasi Berkomitmen menjadi Pengaktif (*enabler*) bagi Peningkatan urusan pangan, urusan pertanian serta perikanan bagi Masyarakat Kota Bekasi.

Diperlukan Komitmen yang Kuat dari Seluruh Jajaran DKPPP Kota Bekasi untuk Merealisasi Komitmen tersebut melalui faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Keterpaduan Perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dalam menjaga stabilitas harga pangan serta meningkatkan;
2. Kualitas SDM aparatur cukup baik;
3. Kualitas Peralatan yang tersedia cukup baik;
4. Kerjasama dan Kolaborasi yang Kuat dari Seluruh Aparatur DKPPP Kota Bekasi untuk Meningkatkan Pelayanan terhadap kelompok tani dan kelompok budidaya perikanan dan peternakan;

Tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- 1) Lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan makin berkurang;
- 2) Hasil pertanian dan perikanan cenderung menurun;
- 3) Meningkatnya konsumsi bahan makanan;
- 4) Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi makanan pokok masyarakat masih tinggi;
- 5) Fluktuasi harga pangan;
- 6) Bencana alam;
- 7) Ancaman penyakit zoonosis;
- 8) Terjadinya inflasi.

Mengatasi tantangan yang dihadapi DKPPP selama tahun 2024 yaitu melaksanakan program dan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan (*Urban Farming*), mengadakan pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT), kelompok Tani, pelatihan kelompok budidaya perikanan, Peningkatan pengawasan hewan dan produk hewan, serta melaksanakan vaksinasi hewan.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki pegawai sebanyak 76 orang Pegawai yang terdiri dari pegawai yang berstatus PNS berjumlah 46 pegawai dan 30 pegawai berstatus TKK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel daftar pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dibawah ini :

**Tabel 1.1:**  
**Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2024**

NO	UNIT KERJA	ASN	NON ASN	CPNS	JUMLAH
1	Sekretariat	12	13	0	25
2	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	6	4	0	10
3	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	4	0	6
4	Bidang Pertanian	9	3	0	12
5	Bidang Perikanan	2	4	0	6
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	8	1	0	9
7	UPTD Rumah Potong Hewan	2	0	0	2
8	UPTD Pusat Promosi Ikan Hias	3	1	0	4
9	UPTD Klinik Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>76</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024*

**Tabel 1.1**  
**Data Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024**

SDM	Pendidikan Terakhir						
	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
Pejabat struktural	0	8	6	0	1	0	0
Fungsional Umum	0	1	4	2	12	0	1
Fungsional Tertentu	0	1	8	1	0	0	0
Fungsional Penyetaraan	0	1	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber: Data Umum dan Kepegawaian DKPPP Kota Bekasi

**Tabel 1.2**  
**Data Pendidikan Pegawai TKK DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
Tenaga Kerja Kontrak	30	-	-	16	4	10	-
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian DKPPP Kota Bekasi

Dari sisi prasarana, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memiliki 7 Unit Mobil, yaitu 1 unit mobil dinas jabatan Kepala Dinas, 1 unit mobil dinas jabatan sekretaris, 5 unit mobil dinas jabatan Kepala Bidang, 10 unit mobil operasional lapangan, 1 unit mobil laboratorium Sedangkan Kendaraan Dinas Roda Dua terdapat 23 unit motor. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi karena dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan serta monitoring dan pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kendaraan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyak	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Dinas Jabatan	1 unit	SUV	Operasioanal Kepala Dinas
2	Mobil Dinas Jabatan	1 unit	SUV	Operasioanal Sekretaris Dinas
3	Mobil Dinas Jabatan	5 unit	MPV	Kepala Bidang
4	Mobil Operasional	10 unit	MPV	Operasional Lapangan
5	Mobil Laboratorium	1 unit	Truck	Operasional Lapangan
6	Motor	23 unit	Roda 2	Operasional Lapangan

**Tabel 1.4**  
**Peralatan Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**

No	Jenis Barang	Banyak	Kondisi
1	Laptop	21 unit	Baik
2	Personal Computer	63 unit	Baik
3	Printer	46 unit	Baik
4	Meja kerja ½ biro	75 unit	Baik
5	Kursi Kerja Staf	88 unit	Baik
6	Sofa	23 unit	Baik
7	Meja Rapat	11 unit	Baik
8	Kursi Rapat	50 unit	Baik
9	Infokus	1 unit	Baik
10	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	Baik
11	Scanner	3 unit	Baik
12	Mesin Absensi Sidik Jari	3 unit	Baik
13	Lemari Arsip	58 unit	Baik
14	Televisi	6 unit	Baik
15	Timbangan	4 unit	Baik
16	Brankas	2 unit	Baik
17	Mesin tik	15 unit	Baik
18	Lemari Es	5 unit	Baik
19	Mesin potong rumput	4 unit	Baik

### 1.3 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun 2024 terdiri dari:

#### I. Belanja Langsung Urusan

##### 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

terdiri dari 1 kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

##### 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan :

- a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. **Program Pengawasan Keamanan Pangan** terdiri dari 1 kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** terdiri 1 kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.
5. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** terdiri dari 5 kegiatan :
  - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
  - e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
7. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** terdiri dari 2 kegiatan :
  - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## **II. Belanja Langsung Penunjang Urusan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kabupaten/Kota** terdiri dari 7 kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, DKPPP Kota Bekasi memberikan Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait dibidang Pangan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Peangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait, Adapun Produk Layanan DKPPP Kota Bekasi diantaranya, yaitu :

1. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
2. Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
4. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
5. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
7. Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
9. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ Produk Hewan;
10. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH);
11. Pemotongan Hewan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
13. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Kios Pembudidayaan Ikan Hias.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis

organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## PERENCANAAN KINERJA

## II

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan) Program dan 18 (delapan belas) indikator kinerja/program. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa % (persen), unit, ton, dan kasus sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2024 - 2026 Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

**a. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;
2. Mengendalikan Laju Inflasi;
3. Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota.

**a. Sasaran** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024- 2026, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk ketiga tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
2. Menjaga Stabilitas Harga Komoditas;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke				TARGET AKHIR RENSTRA
					Kondisi Awal	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86%	88%	90%	96%	96%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai AKIP DKPPP	Nilai	80	82	86	88	88
2	Mengendalikan Laju Inflasi		Laju Inflasi	%	1,61	3,05±1	3,08±1	3,07±1	3,07±1
		Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	%	0,54%	0,48%	0,45%	0,40%	0,40%
3	Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota		Peningkatan Pengeluaran Perkapita	%	0,81%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
		Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	%	1,11%	1,14%	1,15%	1,16%	1,15%

**b. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Nilai AKIP DKPPP	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (>90-100) A (>80-90) BB (>70-80) B (>60-70) CC (>50-60) C (>0-30)	Nilai	82
2	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Nilai Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	%	0,48%
3	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Nilai Pengeluaran Konsumsi Perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)	%	1,14%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

**Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP**, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- **Sasaran strategis kedua yaitu Menjaga Stabilitas Harga Komoditas.** Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

- **Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga sektor Makanan.** Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi melaksanakan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian.
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

## Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai AKIP DKPPP	Nilai	82	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	82
2	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	%	0,48%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0,48%
3	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	%	1,14%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	1,14%

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Kegiatan Per Triwulan Tahun 2024**

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.643.804.960</b>	<b>2,961,015,412</b>	<b>5,462,350,143</b>	<b>3,780,353,629</b>	<b>4,440,326,096</b>	
-	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	10,000,000	0.00	0.00	0.00	
-	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13,640,204,000</b>	<b>2,406,243,409</b>	<b>4,449,736,273</b>	<b>3,062,989,259</b>	<b>3,721,235,059</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.370.693.000	2.973.153.032	4.021.004.646	2.908.756.911	2.467.778.411	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0.00	5.000,000	0.00	0.00	
-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.000.000	155.000.000	5,000,000	5,000,000	5000,000	
-	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>440,814,000</b>	<b>31,521,000</b>	<b>346,041,000</b>	<b>31,521,000</b>	<b>31,731,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	0.00	20,000,000	0.00	0.00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	6.655.000	280.035.000	6.655.000	6.655.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.210.000.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000	7.060.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.084.000	64.891.000	75.462.000	37.731.000	0.00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	0.00	5.000.000	0.00	0.00	

-	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,130,730,280</b>	<b>385,952,503</b>	<b>531,574,370</b>	<b>530,843,370</b>	<b>682,360,037</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	50.006.000	49.998.000	49.998.000	49.998.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.520.960	426.831.600	536.331.600	536.331.600	723.026.160	
-	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>409,297,000</b>	<b>132,298,500</b>	<b>126,998,500</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.677.000	122.493.000	100.092.000	<b>100.092.000</b>	<b>0.00</b>	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.500.000	69.900.000	49.800.000	49.800.000	0.00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	<b>0.00</b>	40.000.000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.000.000	0.00	0.00	250.000.000	285.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					<b>-</b>	
-	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.000</b>	
1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	0.00	0.00	0.00	100.000.000	
-	<b>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>401.096.240</b>	<b>0.00</b>	<b>76.430.000</b>	<b>201.726.240</b>	<b>122.940.000</b>	
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	401.096.240	0.00	76.430.000	201.726.240	122.940.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>					<b>-</b>	
-	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>0.00</b>	<b>1.155.700.000</b>	<b>84.300.000</b>	<b>0.00</b>	
1	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.240.000.000	<b>0.00</b>	1.155.700.000	84.300.000	<b>0.00</b>	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0.00</b>	<b>265.470.000</b>	<b>31.490.000</b>	<b>3.040.000</b>	
-	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0.00</b>	<b>265.470.000</b>	<b>31.490.000</b>	<b>3.040.000</b>	
1	Penyediaan Sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan Segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/ Kota	300.000.000	0.00	265.470.000	31.490.000	3.040.000	

<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>						
-	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	302.800.000	10.160.500	292.639.500	0.00	0.00	
1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	302.800.000	10.160.500	292.639.500	0.00	0.00	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						
-	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	37.220.000	0.00	37.220.000	0.00	0.00	
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala mikro dan Kecil	37.220.000	0.00	37.220.000	0.00	0.00	
-	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baju Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	150.000.000	0.00	0.00	150.000.000	0.00	
1	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	0.00	0.00	150.000.000	0.00	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>						
-	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	160.119.100	0.00	98.619.100	0.00	61.500.000	
1	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	160.119.100	0.00	98.619.100	0.00	61.500.000	
-	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/ Kota</b>						
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tanaman	80.731.000	0.00	0.00	0.00	80.731.000	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.231.350.000	13.280.250	1.148.549.750	69.520.000	0.00	
-	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	75.000.000	2.950.000.	0.00	72.050.000	0.00	
1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	75.000.000	2.950.000.	0.00	72.050.000	0.00	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>						
-	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	248.246.500	133.232.500	66.930.000	24.042.000	24.042.000	
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	248.246.500	133.232.500	66.930.000	24.042.000	24.042.000	
-	<b>Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>						
1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	117.504.500	54.194.000	13.500.000	36.310.500	13.500.000	

**AKUNTABILITAS KINERJA****III**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DKPPP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja sasaran strategis DKPPP Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2024 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator

yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai DKPPP Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja DKPPP Kota Bekasi tahun 2024, serta 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Semua indikator kinerja tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	82	79,48	96,92%
2.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	%	0,48%	1,54%	320.8%
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	%	1,14%	1,14%	100%

*Sumber data : Renstra DKPPP 2024-2026 dan Laporan Tahunan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah*

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP, diukur

melalui indikator yaitu Nilai (LHE) AKIP DKPPP 79,48 dengan capaian kinerja 96,92%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP pada indikator belum mencapai target namun dengan nilai interpretasi sangat baik (Nilai BB).

Sasaran strategis kedua yaitu Menjaga Stabilitas Harga Komoditas telah menetapkan indikator yaitu Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan capaian kinerja 320.8%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi pada indikator ini tercapai.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan telah menetapkan indikator yaitu Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan dengan capaian kinerja 100%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi pada indikator ini juga tercapai.

Dengan melihat 3 (tiga) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana ketiga indikator di atas mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan DKPPP Kota Bekasi dalam Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP yang mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar nilai 79,48 dari target nilai yang telah ditetapkan sebesar 82 dengan capaian kinerja 96,92%, indikator tujuan Menjaga Stabilitas Harga Pangan dengan realisasi sebesar 1,54% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,48% dengan capaian kinerja 320.8%, serta indikator tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan yaitu dengan realisasi sebesar 1,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,14% dengan capaian kinerja 100%. Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran DKPPP Kota Bekasi sudah sepenuhnya mendukung tujuan DKPPP Kota Bekasi dan capaian Sasaran Startegis pada RPD Kota Bekasi 2024-2026.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP**

**Indikator Kinerja : Nilai AKIP DKPPP**

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama /Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mencapai Tujuan

RPD 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu *entry point* utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana impelentasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk mencapai indikator Nilai AKIP DKPPP maka DKPPP Kota Bekasi telah melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen SAKIP DKPPP yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan. Adapun capaian indikator Nilai AKIP DKPPP dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**NILAI AKIP DKPPP TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	6	7	8
1	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	82	79,48	96,92%

*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2024 sebesar 82, sementara realisasi mencapai 79,48 maka capaian kinerja tahun 2024 atas Nilai (LHE) AKIP DKPPP sebesar 96,92%, maka capaian Nilai (LHE) AKIP DKPPP pada tahun 2024 belum mencapai target. Dengan demikian pada tahun 2024 komponen dan sub komponen pada point penilaian LHE untuk DKPPP Kota Bekasi telah mendapatkan nilai AKIP “BB” dengan interprestasi Sangat Baik.

Adapun rekapitulasi perolehan Nilai AKIP DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 3.3**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KOTA BEKASI DKPPP KOTA BEKASITAHUN 2024**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	Y/T	NILAI
1	2	3	4	5
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	23,75	23,75
B	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,19	24,19
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,82	11,82
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,72	19,72
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>79,48%</b>	<b>79,48</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	

*Sumber data : Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024*

*Diolah*

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat menunjukkan bahwa secara kuantitas Nilai (LHE) AKIP DKPPP pada tahun 2024 dapat mempertahankan capaian kinerja dengan memperoleh nilai 79,48% dan dengan tingkat akuntabilitas kinerja dengan predikat nilai “ **BB**” (**Sangat Baik**). Hasil evaluasi Tahun Anggaran 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 4 (empat) komponen Manajemen Kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target Renstra Tahun 2024 pada target Renstra Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI REALISASI INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMATARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	Target Renstra	
		2024	2025
Target	Nilai	82	86
Realisasi	Nilai	79,48	-

*Sumber data : Renstra 2024-2026 dan Data LHE Inspektorat terhadap DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Nilai (LHE) AKIP DKPPP pada tahun 2024 sebesar 79,48 dibandingkan dengan target Renstra pada

Tahun 2024 sebesar 82, maka DKPPP Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari DKPPP Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai (LHE) AKIP DKPPP.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga DKPPP Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bekasi turut melaksanakan tindaklanjut dari rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan *crosscutting* kinerja antara DKPPP dengan perangkat daerah Kota Bekasi. Untuk melihat keterkaitan pola hubungan kerja antar instansi perangkat daerah;
- b. Menyusun Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki *cascade* kinerja mulai organisasi hingga individu;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien.

**Tabel 3.5**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA NILAI (LHE) AKIP DKPPP**  
**TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	78,14	79,48

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2023 sebesar 78,14 (BB) dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 82 (A), maka Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi harus dapat meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan. Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%		
1.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.643.804.960</b>	13.817.849.544	83.02 %	<b>100%</b>	16.98%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	8.471.000	84.81 %		15.29%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.370.693.000	10.015.099.134	80.96 %		19.04%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.279.000	85.58 %		14.42%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.000.000	164.614.400	96.83 %		3.17%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.742.000	98.71 %		1.29%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	275.095.000	92.03%		7.97%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.210.000	28.210.000	100 %		0.00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	10.312.500	68.75%		31.25%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.084.000	115.913.467	65.09 %		34.91%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.655.000	93.10 %		6.90%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.120.000	49.000.000	94.01		5.99%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	98.630.165	49.32 %		50.68%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.222.520.960	2.139.128.388	96.25 %		3.75%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.677.000	274.745.200	85.15 %		14.85%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.500.000	133.843.800	78.96 %		21.04%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	39.430.000	98.58%		1.43%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.000.000	435.680.490	81.44 %		18.56%

Sumber: <https://simplibang.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian indikator Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP”, di mana pagu anggaran sebesar Rp16.643.804.960,- dengan realisasi sebesar Rp13.817.849.544,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 83.02% yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 79,48 (BB) dari target sebesar 82 (A), maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan belum efisien. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKPPP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja;
2. Meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
3. Mengajukan usulan penambahan anggaran kegiatan dari tahun sebelumnya untuk menunjang program dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 2 : Menjaga Stabilitas Harga Komoditas****Indikator Kinerja : Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau**

Indikator kinerja pada Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan ukuran yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam Menjaga Stabilitas Harga Komoditas di Kota Bekasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.7**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja**  
**Inflasi Kelompok Makanan, Minuman Dan Tembakau Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Inflasi Minuman dan Tembakau	%	0,48%	1.54% (Rp.479.274.250,00)	320.83%

*Sumber data: Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi Tahun 2024.*

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada tahun 2024 sebesar 0,48%, sementara realisasi mencapai 1.54%, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau adalah sebesar 320.83%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2024 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi sudah mencapai target yang telah ditentukan. Perhitungan Data capaian ini didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi sebab BPS merupakan instansi mempunyai kewenangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi hanya sebagai **irisan** yang mengampu indikator sasaran Inflasi minuman dan tembakau. Jadi apabila dikaitkan dengan capaian indikator program pendukung indikator kinerja sasaran sudah mencapai target. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil inflasi tertinggi di Kota Bekasi. Seiring kenaikan sejumlah harga pangan, saat ini beras masih mengalami kenaikan harga sejak bulan lalu ditengah keterbatasan pasokan. Selain itu, daging ayam ras dan cabai rawit juga mengalami peningkatan harga seiring pasokan yang juga mulai mengalami keterbatasan. Sebagai upaya pengendalian inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di

Kota Bekasi telah melaksanakan program-program pengendalian inflasi berdasarkan kerangka strategi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah Adapun pelaksanaan GPM serentak di Kota Bekasi yaitu :

- Februari 2024 di Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi
- Maret 2024 di Kelurahan Bekasi Jaya dan Kelurahan Jakamulya
- April 2024 di Kelurahan Harapan Mulya Kota Bekasi
- November 2024 di Kelurahan Kayuringin Jaya Kota Bekasi

Serta memantau harga-harga komoditas di pasar selama tahun 2024. Komoditas penyumbang inflasi di Kota Bekasi diantaranya adalah kopi bubuk, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, minyak goreng dan nasi dengan lauk. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi pada Bulan September 2024 diantaranya dipengaruhi harga cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan juga harga bahan bakar minyak (BBM).

Keberhasilan tercapainya target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Melaksanakan perhitungan kestabilan harga pangan pokok beras;
2. Kebutuhan pangan untuk konsumsi rumah tangga merupakan hal pokok dalam kelangsungan hidup, untuk itu selain ketersediaannya juga perlu diperhatikan pola konsumsi rumah tangga atau keseimbangan kontribusi diantara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi standar gizi yang dianjurkan;
3. Pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh pola makan sebagian besar penduduk, ketersediaan bahan pangan dan tingkat pendapatan;

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada DKPPP Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (%)
1	Stabilitas Harga Pangan	%	<5	4.45	112.35
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88.50	91.53	103.42

*Sumber data : Evaluasi Internal DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah.*

## 1. Indikator Program Stabilitas harga Pangan

Untuk mengetahui stabilitas harga pangan digunakan formulasi sebagai berikut :

**Standar deviasi = stdev**

**CV (coefisien Varian) = stdev/ average \*100%**

Jika didapat kurang dari 5% berarti "stabil" jika lebih berarti "fluktuatif"

**Tabel 3.9**  
**Data Stabilisasi Harga Pangan Beras di Kota Bekasi Tahun 2024**

No.	Bulan	Minggu-1	Minggu-2	Minggu-3	Minggu-4	Rata-rata Harga
1	Januari	Rp 12,900.00				
2	Februari	Rp 13,000.00	Rp 13,000.00	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00	Rp 14,000.00
3	Maret	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00	Rp 15,000.00	Rp 14,000.00	Rp 14,750.00
4	April	Rp 14,000.00				
5	Mei	Rp 14,000.00	Rp 13,000.00	Rp 13,000.00	Rp 13,000.00	Rp 13,250.00
6	Juni	Rp 13,000.00				
7	Juli	Rp 13,000.00				
8	Agustus	Rp 13,000.00				
9	September	Rp 13,000.00				
10	Oktober	Rp 13,000.00				
11	November	Rp 13,000.00				
12	Desember	Rp 13,000.00				
Jumlah Rata-rata						13,325
STDEV						592.95
CV						4.45%

*Sumber : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, diolah*

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat kestabilan harga pangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara jumlah rata rata harga pangan stabil. Sehingga sasaran strategis stabilitas harga pangan dapat dikatakan tercapai. Pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah. Kenaikan dan gejolak yang terjadi pada komoditas pangan terutama beras akan menurunkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat yang berpenghasilan rendah dan juga memicu kenaikan laju inflasi. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat, gejolak harga yang terjadi akan berdampak kepada masyarakat selaku konsumen dan juga petani selaku produsen komoditas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga pasar.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Stabilitas Harga Pangan ini yaitu :

- a) Selama Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan melakukan

Operasi pasar yang merupakan upaya jangka pendek untuk menekan harga pangan;

- b) Selama tahun 2024 Membentuk dan bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk memotong mata rantai pasok yang selama ini menyebabkan harga pangan tinggi.
- c) Selama tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan pertanian dan Perikanan Memetakan jalur distribusi bahan pokok untuk menjaga kelancaran distribusi dan mengidentifikasi masalah apabila terjadi gejolak harga.

Melaksanakan koordinasi daerah dan penetrasi pasar menjelang puasa dan lebaran dan hari besar keagamaan lainnya dalam rangka menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

## 2. Indikator Program Skor Pola Pangan harapan (PPH)

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Program Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan gambaran kondisi konsumsi pangan penduduk secara kualitas yang juga menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Hasil Justifikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2024 menggunakan data susenas tahun 2024 dengan perhitungan memakai perhitungan AKE = 2100 kkal/kapita/hari dan AKP = 57 Gram/kapita/hari ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.10

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	296.55	1127.39	26.13	53.69	26.99	0.5	25	26.84	25
2	Umbi-umbian	34.77	36.9	0.42	1.76	0.88	0.5	2.5	0.88	0.88
3	Pangan Hewani	157.46	345.63	29.57	16.46	33.1	2	24	32.92	24
4	Minyak dan Lemak	30.81	276.08	0.05	13.15	6.61	0.5	5	6.57	5
5	Buah/Biji Berminyak	1.84	10.5	0.18	0.5	0.25	0.5	1	0.25	0.25
6	Kacangkacangan	36.05	77.69	7.58	3.7	7.44	2	10	7.4	7.4
7	Gula	10.97	42.36	0.1	2.02	1.01	0.5	2.5	1.01	1.01
8	Sayur dan Buah	249.81	117.56	3.3	5.6	28.14	5	30	27.99	27.99
9	Lain-lain	99.35	54.46	1.34	2.59	0	0	0	0	0
	Total	917.61	2088.57	68.67	99.47	104.42	11.5	100	103.86	91.53

Sumber : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Dengan melihat capaian indikator program Skor Pola Pangan harapan (PPH) yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Inflasi Kelompok Makanan.  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Minuman dan Tembakau secara signifikan .

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator program Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi ini yaitu :

1. Adanya pelaksanaan diversifikasi (penganekaragaman) pangan masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang pangan lokal;
2. Mengadakan kegiatan Lomba Cipta Menu berbasis sumber daya lokal yang diikuti anggota PKK dari 12 Kecamatan se-kota Bekasi;

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11.**

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	INFLASI KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	
		2023	2024
Target	%	0	0.48
Realisasi	%	0	1.54

*Sumber data : Renstra 2024-2026 DKPPP Kota Bekasi, diolah*

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Kinerja Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada tahun 2023 sebesar 0% dan realisasi Indikator kinerja Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada tahun 2024 sebesar 1.54%, maka DKPPP Kota Bekasi dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan dalam mempertahankan capaian kinerja Indikator Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau diantaranya :

- a. Melakukan evaluasi terhadap indikator program agar seluruh Bagian di DKPPP memiliki indikator program yang harus tercapai dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian agar kinerjanya maksimal.
- b. Melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan per triwulan pada setiap Bagian dan menjadikan hasil evaluasi berkala tersebut menjadi bahan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Kota Bekasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024**  
**Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau**

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023					ANGGARAN TAHUN 2024				
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
1	<b>Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	521.240.000	445.963.000	85,56	100	14,44	501.096.240	479.274.250	95.65	100	4.35%
		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Stabilitas Pasokan Harga Pangan</b>	133.670.000	133.670.000	100	100	0	100.000.000	100.000.000	100	100	0
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	133.670.000	133.670.000	100	100	0	100.000.000	100.000.000	100	100	0
		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	387.570.000	312.293.000	80,58	100	19,42	401.096.240	379.274.250	94.56	100	5.44
		Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penganekaragaman Sumber Daya Lokal	387.570.000	312.293.000	80,58	100	19,42	401.096.240	379.274.250	94.56	100	5.44

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dimana pagu anggaran pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp 501.096.240,00 (*lima ratus satu juta Sembilan puluh enam ribudua ratus empat puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 479.274.250,00 (*empat ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 95.65% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Capaian indikator sasaran tersebut jika dikaitkan dengan target Renstra pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	INFLASI KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	
		2024	2025
Target	%	0.48	0.45
Realisasi	%	1.54	0

*Sumber data : Renstra 2024-2026 DKPPP Kota Bekasi, diolah*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau terdapat realisasi kinerja dari 1.54% pada tahun 2024, sedangkan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 0.45%. oleh sebab DKPPP harus lebih meningkatkan capaian atas indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang sudah diraih saat ini serta melakukan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pencapaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau secara optimal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Gelar Pasar Murah (GPM) di kecamatan dan Kelurahan;
2. Melaksanakan Pemutakhiran Peta Kerawanan Pangan;
3. Melaksanakan Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Bekasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah  
tangga Sektor Makanan**

**Indikator Kinerja : Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga  
Sektor Makanan**

Indikator kinerja peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan	%	1.14%	1.14% (Rp.4.145.771.100)	100%

Sumber data: Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi Tahun 2024.

Dari tabel tersebut diatas bahwa target peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan pada tahun 2024 sebesar 1.14%, sementara realisasi mencapai 1.14%, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan adalah sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2024 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi sudah mencapai target yang telah ditentukan. Perhitungan Data capaian ini didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi sebab BPS merupakan instansi mempunyai kewenangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi hanya sebagai **irisan** yang mengampu indikator sasaran Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan. Jadi apabila dikaitkan dengan capaian indikator program pendukung indikator kinerja sasaran sudah mencapai target.

Untuk mencapai target atas indikator kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tepat waktu dan tepat sasaran karena didukung data dan informasi yang valid penerima bantuan cadangan pangan (data FSVA dan Dinas Sosial)
2. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, pengawasan PSAT dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan sasaran untuk meningkatkan ketahanan pangan yang kuat;
3. Melakukan pengawasan dengan pengambilan sampel pangan melalui pengujian 20 pasar tradisional dan pasar modern se Kota Bekasi.
4. Melakukan pelatihan dan pendampingan pembudidaya ikan;
5. Melaksanakan penerapan persyaratan dan standar usaha pengolahan ikan;
6. Melakukan pendampingan penggunaan sarana pertanian;
7. Melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
8. Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada DKPPP Kota Bekasi, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
Indikator Capaian Program Pendukung  
Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

NO	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian kinerja Tahun 2024 (%)
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	persen	87.00	100	114.94
2	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	persen	85.50	98.16	110.92
3	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	ton	1.974,79	1.985,40	100,53%
4	Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	25.361.323	25.219.625	99,44%
5	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton	93.865,05	94.818,02	101,02%
6	Produksi Komoditas Pertanian	ton	36.168,00	24.157,85	66.79%
7	Jumlah Produksi Peternakan	ton	11.093,00	10.572,02	95.30%
8	Jumlah Produksi Olahan Peternakan	ton	3.817,00	3.821,28	100,00%
9	Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosis	kasus	Tidak ada	Tidak ada	100%

10	Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	80	86	107,50%
11	Persentase Produk PAH yang ASUH	persen	45,20	45,63%	100,95%

Sumber data : Realisasi Capaian IKU DKPPP Kota Bekasi Tahun 2024, diolah.

Dengan melihat capaian indikator program yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Indikator Program Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Tabel 3.16

Analisis Capaian Indikator Program Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2024

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024
			target	realisasi	
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	persen	87.00	100.00	114.94%

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 87.00 Persen, sementara realisasi hanya mencapai 100 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Program Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kota Bekasi sebesar 114.94 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator program Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2024 sudah mencapai target. Dimana formulasi pengukuran persentase penanganan kerawanan pangan yaitu  $(\text{Jumlah Kelurahan yang dibantu} / \text{Jumlah Kelurahan Kota Bekasi} \times 100\%)$ .  $\text{Kelurahan} / 56 \text{ Kelurahan} = 100\%$  (seratus persen)

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator program Persentase Penanganan Kerawanan Pangan ini yaitu :

1. Melakukan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk Balita Gizi Kurang.
2. Melakukan pendistribusian CPPD pada korban bencana alam.

## 2. Indikator Program Persentase Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 3.17

Persentase Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Pengujian PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) dan Olahan Tahun 2024

No	Nama Pasar/Gapoktan /Perusahaan/Alamat	Jenis Uji (Kualitatif)								Jumlah Sampel Diperiksa
		Pestisida		Rhodamin B		Chlorine		Methyl Yellow		
		-	+	-	+	-	+	-	+	
<i>Triwulan I</i>										
1	Pasar Tradisional Pasar Bintara Jln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat	63	3	4	-	-	-	-	-	70
2	Pasar Modern Superindo Bintara Jl. Bintara No.354, RT.003 /RW.009, Bintara, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17134	26	1	2	-	-	-	-	-	29
3	Pasar Tradisional Bantargebang Jl. Raya Narogong Kel. Bantargebang Kec Bantargebang	-	-	-	-	18	-	-	-	18
4	Pasar Modern Top Buah Segar Cibubur Jl. Raya Cibubur – Cilengsi No 1 Blok R6' RT.002/RW.008 Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi Jawa Barat	26	-	2	-	-	-	-	-	28
5	Pasar Tradisional Pasar Atrium Pondokgedede Jl. Raya Jatiwaringin Kel Jatiwaringin Kec. Pondokegedede	-	-	-	-	22	-	-	-	22
6	Pasar Modern Tip Top Pondokgedede Jl. Raya Jati Makmur No.30, RT.007/ RW.003, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat 17413	21	1	2	-	-	-	-	-	24
7	Pasar Tradisional Kranggan Jl. Raya Ps. Kranggan, RT.001/ RW.005 Kel. Jatisampurna Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat	-	-	-	-	16	-	-	-	16
9	Pasar Family Harapan Indah-Bekasi Jl. Anggrek 2, RT.014/ RW.017, Kel. Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131	9	-	1	-	6	-	-	-	16
10	Pasar Modern Farmers Market - Kota Harapan Indah Farmers Market Kota Harapan Indah Living Plaza Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132	26	-	2	-	-	-	-	-	28
12	Alfamidi Super Jl. Pramuka No.96-101, RT.004/RW.002, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17114	20	1	2	-	-	-	-	-	23
13	Pasar Tradisional Pasar Harapan Jaya Jl. Seroja Kel. Harapan Jaya Kec Bekasi Utara	-	-	-	-	15	-	-	-	15
14	Pasar Modern Naga Swalayan Pondok Ungu Jl. Sultan Agung Km 27 Pondok Ungu, Medan Satria Kota Bekasi Jawa barat 17510	22	1	2	-	-	-	-	-	25
15	Pasar Tradisional Pasar Baru Jln. Ir. H. Juanda Kel. Aren Jaya Kec, Bekasi Timur Kota Bekasi	18	-	-	-	8	-	-	-	26
16	Pasar Modern Lotte Mart Wholesale Jl. Jend. Achmad Yani No 18 RT 005 RW 001 Kel, Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
17	Pasar Tradisional Pasar Kranji Baru Jl. Pemuda Kranji Kel, Jakasampurna Kec. Bekasi barat	20	-	2	-	8	-	1	-	31
18	Pasar Modern Farmers Marker Grand Metropolitan Mall Bekasi Jl. KH. Noer Ali No 13 RT.008 RW 002 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi SelatanKecamatan Bekasi Selatan	10	-	-	-	-	-	-	-	10
19	Pasar Modern Super Indo Metropolitan Mall Bekasi Jl. KH. Noer Ali No 13 RT.008 RW 002 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan	11	1	1	-	-	-	-	-	13

20	Pasar Modern Lulu Hypermarket Mega City Bekasi Mall Jl. Jend. Achmad Yani Mega City Bekasi Mall Kelurahan Margajaya, Kec, Bekasi Selatan Kota Bekasi	9	1	1	-	-	-	-	-	11
21	Pasar Tradisional Jatiasih Jl. Raya Jatuiasih Bekasi Kel. Jatirasa Kec, Jatiasih	16	-	3	-	8	-	-	-	27
22	Pasar Modern Naga Swalayan Pekayon Jl. Raya Pekayon No 29, Rt.001/Rw.020 Kel. Pekayon Jaya Kec, Bekasi Selatan	14	-	1	-	-	-	-	-	15
<b>Triwulan II</b>										
23	Pasar Tradisional Pasar Baru Jln. Ir. H. Juanda Kel. Aren Jaya Kec, Bekasi Timur Kota Bekasi	29	-	1	-	-	-	-	-	30
24	Pasar Tradisional Pasar Kranji Baru Jl. Pemuda No.1, Jakasampurna, Kec. Bekasi Bar., Kota Jawa Barat 17145	28	-	-	-	-	-	-	-	28
25	Pasar Tradisional Pasar Bantargebang Jl. Raya Narogong Kel. Bantargebang Kec Bantargebang	27	-	-	-	-	-	-	-	27
26	Pasar Tradisional Pasar Kranggan Jl. Raya Ps. Kranggan, RT.001/RW.005 Kel. Jatisampurna Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat	26	-	1	-	-	-	-	-	27
27	Pasar Tradisional Jatiasih Jl. Raya Jatuiasih Bekasi Kel. Jatirasa Kec, Jatiasih	27	-	-	-	-	-	-	-	27
<b>Triwulan III</b>										
28	Pasar Tradisional Pasar Baru Jln. Ir. H. Juanda Kel. Aren Jaya Kec, Bekasi Timur Kota Bekasi	9	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>Triwulan IV</b>										
29	Super indo Metropolitan Mall Bekasi Jln raya Kalimalang RT 008 / RW 002 Kel, Pekayon Jaya Kec, Bekasi Selatan	22	-	-	-	-	-	-	-	22
30	TIP TOP Pondok Gede Jl. Raya Jati Makmur No.30, RT.007/RW.003, Jatirahayu, Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi	16	-	-	-	-	-	-	-	16
31	Naga Swalayan Pondok Gede Jl. Raya Pondok Gede Lat 1 RT/RW 001 Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi,	19	-	-	-	-	-	-	-	19
32	Top Buah Segar Jl. Raya Cibubur - Cileungsi No.1 Blok R6, RT.002/RW.008, Jatisampurna, Bekasi	20	-	-	-	-	-	-	-	20
33	Super Indo Cerewed Jl. Mekar Sari No.14, RT.004/RW.008, Kel, Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi	15	1	-	-	-	-	-	-	17
34	Lotte Mart Wholesale Jl. Jend. Achmad Yani No 18 RT 005 RW 001 Kel, Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
35	Naga Swalayan Pekayon Jl. Raya Pekayon No 29 RT 001 RW 020 Kel, Pekayon Jaya Kec, Bekasi Selatan	12	-	-	-	-	-	-	-	12
36	Hari Hari BTC Jln. HM. Joyo Martono RT 003 RW 021 Kel, Margahayu Kec, Bekasi Timur, Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
36	Super Indo Kincan Jln, Kincan Raya No 22 Kel, Jati Bening, Kec, Pondok Gede Kota Bekasi	9	1	-	-	-	-	-	-	10
37	The Food Hall Grand Galaxy Park Mall Jl. Boulevard Raya No.1, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
37	GS Supermarket Wibawamukti Jln Wibawamukti II No 12, Kel Jatiasih, Kec, Jatiasih Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
39	Super Indo Prima Harapan Regency Jln Prima Harapan Regency Kel, Perwira Kec, Bekasi Utara Kota Bekasi	15	-	-	-	-	-	-	-	15
40	Naga Swalayan Jl. Pejuang No 88 RT 001 RW 008, Kel, Harapan Baru, Kec, Bekasi Utara, Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
41	Pasar Bantargebang Jln Raya Narogong Kel, Bantargebang Kec, Bantargebang Kota Bekasi	27	3	-	-	-	-	-	-	30

42	Alfamidi Super Jl. Pramuka No.96-101, RT.004/RW.002, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi	10	-	-	-	-	-	-	10	
<b>Total Sampel Diperiksa</b>		<b>705</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>869</b>

Sumber : Data Olahan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 88.50% dan realisasi 98.16% Persen. Untuk menghitung realisasi ini dengan formula : **Jumlah sampel yang memenuhi syarat / jumlah total sampel x 100%** (jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 853 dan jumlah total sampel sebanyak 869) jadi :  $853/869 \times 100\% = 98.16$ , maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator program Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Bekasi sebesar 98.16%. Dengan melihat capaian indikator program Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2024 yang tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau secara signifikan .

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator program Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan ini yaitu :

1. Melakukan Pengawasan dan pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
2. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di pasar modern maupun pasar tradisional;
3. Melakukan edukasi keamanan pangan kepada para pelaku usaha UMKM Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

### 3. Indikator Program Jumlah Produksi Ikan Hias

**Tabel 3.18**  
**Jumlah Produksi Ikan Hias Kota Bekasi tahun 2024**

Produksi	Jenis Ikan Hias	Bulan	Agregat					Total
				01-Januari	02-Februari	03-Maret	04-April	
	Ikan Hias Air Tawar							
Ikan	1,145,800	1,831,300	1,602,400	2,060,200	2,518,000	2,289,100		
Grand Total	1,145,800	1,831,300	1,602,400	2,060,200	2,518,000	2,289,100	11,446,800	
Arwana Silver (Ost	79,881	127,310	111,410	143,886	175,235	159,762	797,484	
Black Ghost (Apter	159,762	259,600	243,867	287,574	351,478	319,325	1,621,606	
Botia (Chromobotia	57,058	92,273	79,881	108,714	125,528	119,116	582,570	
Cupang Siamese Fi	102,704	165,327	105,786	184,868	225,900	205,409	989,994	
Gupi (Lebistes retic	148,351	237,345	201,691	267,031	326,372	296,702	1,477,492	
Manvis (Pterophyllu	193,999	310,396	300,596	349,195	426,794	389,974	1,970,954	
Mas Koki; Koki (Car	175,814	273,878	239,644	308,113	376,583	342,348	1,716,380	
Neon Tetra (Parad	45,646	73,034	63,905	82,164	108,422	91,293	464,464	
Red discus (Symp	136,939	219,103	191,715	246,491	301,266	273,878	1,369,392	
Udang Karang Mex	45,646	73,034	63,905	82,164	100,422	91,293	456,464	

Produksi	Jenis Ikan Hias		Bulan	Agregat				Total
	Ikan Hias Air Tawar							
	07-Juli	08-Agustus	09-September	10-Oktober	11-November	12-Desember		
Ikan	1,795,040	1,933,120	2,209,280	2,485,440	2,623,520	2,761,610		
Grand Total	1,795,040	1,933,120	2,209,280	2,485,440	2,623,520	2,761,610	13,808,010	
Arwana Hijau; Arwana	43,603	54,650	76,743	98,836	109,882	20,919	404,633	
Black Ghost (Apteronotus albifrons)	315,405	231,975	365,114	498,253	414,823	432,397	2,257,967	
Botia (Chromobotia maculata)	33,356	51,306	87,202	23,108	141,054	189,009	525,035	
Cupang Siamese (Corydoras siamensis)	369,256	389,969	331,393	472,811	493,529	486,725	2,543,683	
Gupi (Lebistes reticulatus)	251,306	370,637	309,300	347,962	367,293	483,624	2,130,122	
Koi (Cyprinus carpio)	40,155	60,627	60,743	60,526	100,999	50,000	373,050	
Lou Han (Amphiprion melanochirum)	143,603	154,650	132,557	198,836	209,882	220,928	1,060,456	
Manvis (Pterophyllum muriei)	257,703	265,987	375,578	299,127	157,411	265,696	1,621,502	
Mas Koki; Koki (Carassius auratus)	215,000	218,000	316,000	312,000	445,000	419,000	1,925,000	
Red discus (Symphysodon discus)	53,851	57,994	66,279	74,563	78,706	82,848	414,241	
Tetra Congo (Phenacogaster congoensis)	71,802	77,325	88,371	99,418	104,941	110,464	552,321	

Sumber : Data dari Bidang Perikanan tahun 2024,diolah

Sepuluh jenis ikan hias yang banyak dibudidayakan diantaranya: arwana silver, blackghost, Botia, Cupang, Manvish, Red Discus, Sapu-Sapu Sukemoth, tetra congo, tetra, Udang Karang Mexician Dwaft yang merupakan kegiatan budidaya perikanan yang banyak digeluti masyarakat Kota Bekasi.

Faktor penentu keberhasilan indikator Jumlah Produksi Ikan Hias ini yaitu :

- Selama tahun 2024 produksi sektor budidaya ikan hias meningkat karena adanya pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha budidaya ikan Hias di Kota Bekasi;
- Adanya daya dukung lingkungan pembudidayaan ikan hias, dengan meningkatkan sarana prasarana penunjangdan pemilihan induk yang berkualitas;
- Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi selalu berkordinasi/hadir mendampingi para pembudidaya ikan hias untuk melaksanakan produksi dengan hasil yang baik.

#### 4. Indikator Program Jumlah Produksi Ikan Konsumsi

Tabel 3.19 Jumlah Produksi Ikan Konsumsi di Kota Bekasi tahun 2024

Produksi	Jenis Pembenihan		Bulan	Agregat				Total
	Pembenihan Air Tawar							
	01-Januari	02-Februari	03-Maret	04-April	05-Mei	06-Juni		
Ikan	1,801	2,551	3,302	2,253	3,452	1,651		
Grand Total	1,801	2,551	3,302	2,253	3,452	1,651	15,010	
Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	90	127	165	113	173	82	750	
Lele (Clarias batrachus)	901	1,276	1,651	1,127	1,726	826	7,507	
Nila (Oreochromis niloticus)	630	893	1,156	788	1,208	578	5,253	
Patin (Pangasius Pangasius)	180	255	330	225	345	165	1,500	

Produksi	Jenis Pembenihan		Bulan	Agregat				Total
	Pembenihan Air Tawar							
	07-Juli	08-Agustus	09-September	10-Oktober	11-November	12-Desember		
Ikan	2,702	3,828	4,953	3,377	5,179	2,477		
Grand Total	2,702	3,828	4,953	3,377	5,179	2,477	22,516	
Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	135	191	248	169	259	124	1,126	
Lele (Clarias batrachus)	1,351	1,914	2,476	1,688	2,589	1,238	11,256	
Nila (Oreochromis niloticus)	946	1,340	1,734	1,182	1,813	867	7,882	
Patin (Pangasius Pangasius)	270	383	495	338	518	248	2,252	

Sumber : Data dari Bidang Perikanan tahun 2024,diolah

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator program Jumlah Produksi Ikan Konsumsi ini yaitu :

- a. Melakukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan hasil produksi ikan konsumsi;
- b. Adanya dukungan sarana prasarana dan pemilihan induk yang berkualitas.

## 5. Indikator Program Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Konsumsi

**Tabel 3.20**  
**Produksi Unit Pengolahan Ikan di Kota Bekasi Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah	Pembekuan	Pemindangan	Pengolahan Lainnya (UPI Kecil)
1	Januari	8,448,921	6,252,202	1,689,784	506,935.26
2	Pebruari	7,510,152	5,557,512	1,502,030	450,609.12
3	Maret	5,632,614	4,168,134	1,126,523	337,956.84
4	April	6,571,383	4,862,823	1,314,277	394,282.98
5	Mei	11,265,228	8,336,269	2,253,046	675,913.68
6	Juni	9,387,690	6,946,891	1,877,538	563,261.4
7	Juli	2,816,307	2,084,067	563,261	168,978.42
8	Agustus	1,877,538	1,389,378	375,508	112,652.28
9	September	13,142,766	9,725,647	2,628,553	788,565.96
10	Oktober	4,693,845	3,473,445	938,769	281,630.7
11	Nopember	12,203,997	9,030,958	2,440,799	732,239.82
12	Desember	10,326,459	7,641,580	2,065,292	619,587.54
	TOTAL	94.818,02	69,468,906	18,775,380	5,632,614.

Sumber : Bidang Perikanan

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan ini yaitu :

1. Selama tahun 2024 Meningkatkan sektor perikanan UKM olahan ikan dan meningkatkan prasarana penunjang usaha agar tetap lancar.
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan pembudidaya ikan (*lahan tambak* : udang, bandeng, dsb)
3. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Bidang Perikanan selalu berkordinasi/hadir mendampingi para pelaku UMKM Olahan hasil perikanan agar dapat meningkatkan produksi dengan hasil yang baik.

## 6. Indikator Kinerja Produksi Komoditas Pertanian

Tabel 3.21  
Data Produksi Komoditas Pertanian Kota Bekasi Tahun 2023-2024

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)	
		TH.2023	TH.2024
1	<b>TANAMAN PANGAN</b>		
	- Padi	3.586,6	1.499,61
	- Jagung	183,9	159,62
	- Kedelai	-	-
	- Ubi Kayu	189,6	229,54
	- Ubi Jalar	-	-
	- Kacang Tanah	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.960</b>	<b>1.888,77</b>
2	<b>SAYURAN</b>		
	- Petsai Sawi	2.234	1.873,20
	- Kacang Panjang	828	402,50
	- Bayam	5.183	5.220,00
	- Ketimun	-	4.843,42
	- Cabe Rawit	1.200	1.230,00
	- Terong	630	588,00
	- Kangkung	5.529	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.426</b>	<b>14.157,12</b>
3	<b>BUAH</b>		
	- Alpukat	-	6
	- Belimbing	94	79
	- Jeruk	3	4
	- Durian	8	6
	- Duku	12	12
	- Jambu Biji	710	539
	- Nangka	40	41
	- Jambu Air	16	11
	- Mangga	259	128
	- Sawo	365	209
	- Pepaya	1.530	1.241
	- Pisang	654	578
	- Rambutan	1.119	983
	- Sirsak	15	13
	- Sukun	12	13
	- Melinjo	59	65
	- Petai	4	6
	-Jengko	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.514</b>	<b>3.935,00</b>
4	<b>BIOFARMAKA</b>		
	- Jahe	2.652	1.065
	- Laos / Lengkuas	2.662	2.024
	- Kencur	416	337
	- Kunyit	385	361
	- Lempuyang	221	180
	- Temu Ireng	-	-
	- Lidah Buaya	2	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.338</b>	<b>3.967</b>
	<b>HIDROPONIK</b>	<b>140</b>	<b>209,96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30.942</b>	<b>24.157,85</b>

Sumber: Bidang Pertanian 2024, diolah

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di atas. Produksi pertanian di kota Bekasi terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan/biofarmaka), peternakan, dan perikanan. bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok tanaman pangan. Produksi pertanian berupa tanaman obat-obatan pada tahun 2023 sebesar 6.338 ton dan tahun 2024 turun signifikan menjadi 3.967 ton. Sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2023 produksinya 15.426 ton dan pada tahun 2024 produksi sayuran naik cukup signifikan menjadi 14.157,12.

Adapun faktor yang menentukan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Produksi pertanian berkurang karena lahan tidak ada tanam cukup lama karena kemarau Panjang;
2. Lahan pertanian berkurang akibat banyaknya alih fungsi lahan sehingga produksi pertanian berkurang;

## 7. Indikator Program Jumlah Produksi Peternakan

**Tabel 3.22 Pencapaian Produksi Peternakan Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Peternakan	ton	11.093	10.572,02	95,30%

**Tabel 3.23 Jumlah Produksi Peternakan Tahun 2024**

No.	Jenis Komoditas	Produktivitas (ton)
		2024
1	Daging sapi	2.253,93
2	Daging kerbau	17,04
3	Daging domba	2.729,41
4	Daging kambing	3.346,46
5	Daging babi	5,92
6	Daging unggas	2.156,92
	<b>Jumlah</b>	<b>10.509,68</b>
7	Telur	17,53
	<b>Jumlah</b>	<b>17,53</b>
8	Susu	44,81
	<b>Jumlah</b>	<b>44,801</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>10.572,02</b>

Sumber: Data olahan bidang peternakan Kesehatan hewan Tahun 2024

Indikator kinerja Jumlah Produksi Hasil Peternakan dihitung dengan cara melaksanakan pendataan jumlah produksi peternakan yang terdiri dari produksi ternak sapi, domba/kambing, unggas dan babi di Kota Bekasi.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Peternakan ini yaitu :

- a. Selama tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah populasi ternak sapi sebesar 19,5%, kambing 30,12%, dan domba 27,84%.
- b. Sepanjang tahun 2024, melaksanakan pembinaan teknis peternakan, baik dengan cara budidaya ternak, manajemen sistem kandang, pembibitan/pengembangbiakan, penggemukan, pakan, serta pemanfaatan limbah;
- c. Meningkatkan jumlah pelaku usaha peternakan dan
- d. Menambah dan meningkatkan luas lahan Peternakan
- e. Melatih Pelaku usaha peternakan agar memiliki kemampuan teknis budidaya peternakan yang baik.

#### 8. Indikator Program Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan

**Tabel 3.24**  
**Pencapaian Produksi Olahan Hasil Peternakan Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan	ton	3.817,00	3.821,28	100,11%

**Tabel 3.25**  
**Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan Tahun 2024**

Unit Usaha	Jumlah Orang	Tahun 2024	
		Kg	Ton
Bakso	520	3.765.600,00	3.765,60
Rendang	12	24.480,00	24,48
Sosis	10	31.200,00	31,20
Jumlah		3.821.280,00	<b>3.821,28</b>

*Sumber: Data olahan bidang peternakan Kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024*

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 3.817,00 ton, sementara realisasi mencapai 3.821,28 ton, maka capaian kinerja tahun 2024 atas Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan di Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 100,11 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator Tahun 2024 sudah melebihi target.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan ini yaitu :

Selama tahun 2024 terjadi peningkatan produksi olahan hasil peternakan seperti pembuatan bakso, sosis, rendang dan nugget dan olahan lainnya;

- a. Menambah jumlah pelaku usaha olahan hasil peternakan;
- b. Melatih Pelaku usaha olahan peternakan agar memiliki kemampuan teknis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;

## 9. Indikator Progran Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis

Tabel 3.26  
Terkendalnya penyakit hewan menular dan zoonosis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Terkendalnya penyakit hewan menular dan zoonosis	kasus	Tidak ada	Tidak ada	100%

Sumber: Data olahan bidang peternakan Kesehatan hewan Tahun 2024

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Septicaemia Epizootica (SE) dan merupakan penyakit hewan menular strategis yang menyerang mayoritas hewan ternak ruminansia di Indonesia. Kota Bekasi sepanjang Tahun 2024 memiliki total laporan penyakit PMK sebanyak 1 kasus dan penyakit SE sebanyak 1 kasus. Sapi yang terserang penyakit tersebut dinyatakan sembuh setelah dilakukan pengobatan. PMK dan SE tidak termasuk ke dalam kategori penyakit zoonosis, sehingga banyaknya kasus penyakit zoonosis pada Tahun 2024 sebanyak 0 kasus

Tabel 3.27  
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Kota Bekasi Tahun 2024  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi

ID kasus	Tanggal laporan	Jumlah hewan	Spesies	Kecamatan	Desa	Diagnosis definitif	Keterangan
44867075	05/10/2024	3	Sapi	Pondok Melati	Jatimurni	Septicaemia Epizootica (SE)	Hewan dinyatakan sembuh pada 12/10/2024
44823581	05/07/2024	5	Sapi	Bekasi Utara	Teluk Pucung	Penyakit Mulut dan Kuku	Hewan dinyatakan sembuh pada 10/07/2024
<b>TOTAL</b>		8				0	

Sumber : Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Telah dilakukan pengobatan suportif terhadap seluruh laporan kejadian Penyakit Mulut dan Kuku dan Septicaemia Epizootica (SE) sehingga pada akhir tahun 2024 tercatat seluruhnya dinyatakan sembuh.

### 10. Indikator Program Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan yang bersertifikat Teknis

Tabel 3.28  
Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Bersertifikat Teknis di Kota Bekasi tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	80	86	107,5%

Tabel 3.29  
Unit usaha PKH yang bersertifikat teknis di Kota Bekasi tahun 2024

No.	Nama Unit Usaha	No. NKV	Tingkat/Level Penilaian NKV	Jenis Usaha
1	PT. Lentera Nusa Buana	ID-327501-010	III	Importir Daging
2	PT. Wyeth Indonesia	ID-3275061-023	II	Importir Daging
3	PT. Dua Putra Perkasa Pratama	ID-3275121-026	III	Importir Daging
4	PT. Suri Nusantara Jaya	ID-3275011-032	III	Importir Daging
5	PT. Sarimelati Kencana	ID-3275030-036	II	Importir Produk Daging
6	PT. Arnott's Indonesia	ID-3275061-055	II	Importir produk susu
7	PT. Hijrah Gizi Hewan	ID-3275112-058	II	Importir/Distributor daging
8	PT. Limasa Mitratama	ID-3275120-074	III	importir daging
9	PT. Singa Mas Internasional	ID-3275030-075	II	importir daging
10	PT. Kiat Ananda Cold Storage	ID-3275030-076	II	Cold Storage PAH
11	PT. Berdikari	ID-3275020-091	III	Importir daging
12	PT. Qorni Utama Internasional	ID-3275011-107	III	Importir Madu
13	PT. Madu Sumbawa Alami	ID-3275060-108	II	Importir Madu
14	PT. Dua Putra Perkasa Pratama	ID-3275041-112	I	Importir Daging
15	PT. Adib Global Food Supplies	ID-3275030-120	II	Gudang Daging
16	PT. Nirwana Lestari	ID-3275041-124	I	Importir PAH
17	PT. Prakarsa Alam Segar	ID-3275061-130	II	Importir PAH
18	PT. Cakra Birawa Indonesia	ID-3275020-145	III	importir Daging
19	PT. Halal Thoyyiban Food	RPH-3275020-008	III	RPH-R
20	PT. FiVa Food	TPD- 3275010-008	II	TPD
21	PT. Kingfood	TPD-3275121-014	III	TPD
22	PT. LION SUPERINDO KALIABANG	UR-3275070-005	II	Usaha Retail
23	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA, Tbk (Matahari Supermarket "HYPERMART Grand Mall Bekasi")	UR-3275061-006	II	Usaha Retail
24	PT. LION SUPERINDO "Jatikramat"	UR-3275020-007	II	Usaha Retail
25	PT. Lion Superindo	UR-3275010-012	III	Usaha Retail
26	PT. Hero Supermarket Tbk. "Giant Pondok Gede"	UR-3275010-016	III	Usaha Retail
27	PT. Trans Retail Indonesia "Carrefour Bekasi Square"	UR-3275050-017	II	Usaha Retail
28	PT. Sinar Sahabat Intimakmur "Hari Hari Pasar Swalayan"	UR-3275050-018	III	Usaha Retail
29	PT. Sinar Sahabat Intimakmur "Hari Hari Pasar Swalayan"	UR-3275040-019	III	Usaha Retail
30	PT. Lion Superindo "Superindo Jatibening 2"	UR-3275010-021	II	Usaha Retail
31	PT. Lion SuperIndo " Superindo Jatimakmur"	UR-3275010-022	II	Usaha Retail
32	PT. Lion Superindo "Superindo Cerewed"	UR-3275040-023	II	Usaha Retail

33	PT. Lion Superindo "Superindo Jaka Sampurna"	UR-3275060-024	II	Usaha Retail
34	PT. Trans Retail Indonesia "Carrefour Harapan Indah"	UR-3275061-026	II	Usaha Retail
35	PT. Lion Superindo Taman Harapan Baru	UR-3275061-028	II	Usaha Retail
36	PT. Lion Superindo Metropolitan Mall	UR-3275050-029	II	Usaha Retail
37	PT. Lottemart Indonesia "Bekasi Junction"	UR-3275040-037	II	Usaha Retail
38	PT. Trans Grosir Indonesia "Groserindo Bekasi Juanda"	UR-3275040-039	I	Usaha Retail
39	PT. Trans Grosir Indonesia "Transmart Carrefour Blue Plaza"	UR-3275040-040	I	Usaha Retail
40	PT. Hero Supermarket Tbk (Hero Kemang Pratama)	UR-3275041-048	II	Usaha Retail
41	PT. Madu Sumbawa Alami	PPH-3275060-008	II	Pengolahan Madu
41	PT. Cipta Selera Semesta	PPH-3275020-009	I	pengolahan seasoning ayam dan olahan susu
42	PT. Sahara Bogatama Indonesia	TPD-3275020-025	II	daging Kebab
43	PT. Lion Superindo "Superindo Kota Harapan Indah"	UR-3275061-077	III	Usaha Retail
44	PT. Lion Superindo "Superindo Caman"	UR-3275010-078	III	Usaha Retail
45	PT. Lion Superindo "Superindo Caman"	UR-3275010-078	III	Usaha Retail
46	PT. Lotte Shopping Indonesia "Lottemart Wholesale"	UR-3275050-085	II	Usaha Retail
47	PT. Trans Retail Indonesia Cabang Transmart Pondok Gede	UR-3275010-091	II	Usaha Retail
48	PT. Hero Supermarket Tbk, Cabang Giant Ekstra Cibubur	UR-3275011-095	II	Usaha Retail
49	PT. Garindo Foods International	ID-3275011-168	III	importir daging
50	PT. Indonesia Air Water	ID-3275030-170	II	importir daging
51	PT. Mulia Bosco Utama	ID-3275030-172	II	gudang penyimpanan
52	PT. Sarimelati Kencana Tbk	ID-3275030-177	II	importir PAH
53	PT. Sojitz Indonesia	ID-3275030-178	II	importir PAH
54	PT. Indokulina Sarana Utama	TPD-3275010-028	I	pengolahan baso, sosis, cold cuts
55	PT SANJAYA FOODS	UPD-3275011-004	II	UPD
56	PT. LION SUPER INDO "SUPERINDO PLAZA CIBUBUR"	RITEL-3275011-004	III	RITEL
57	PT. LION SUPER INDO "SUPERINDO UJUNG ASPAL"	RITEL-3275011-005	II	RITEL
58	PT. MULIA BOSCO UTAMA	CS-3275030-012	I	CS
59	PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA	GK-3275061-007	II	GK
60	PT. LION SUPER INDO "WIBAWA MUKTI"	RITEL-3275020-007	II	RITEL
61	PT. MULTIRASA NUSANTARA	CS-3275070-004	I	CS
62	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK (HYPERMART MALL CIPUTRA CIBUBUR)	UR-3275011-001	II	RITEL
63	PT. DKSH Indonesia	GK-3275041-012	I	GK
64	PT. Akun Barokah Utama	CS-3275060-023	II	CS
65	PT. Adib Cold Logistic	CS-3275030-018	I	CS
66	PT. Dua Putra Perkasa Pratama	CS-3275041-004	II	Gudang Berpendingin
67	PT. GS Retail Indonesia GS Supermarket Kemang Pratama	UR-3275041-107	III	Ritel
68	PT. Hero Supermarket Tbk Giant Ekspres Kranggan	UR-3275011-104	II	Ritel
69	PT. GS Retail Indonesia	UR-3275020-103	III	Ritel
70	PT. GS Retail Indonesia	UR-3275010-102	III	Ritel
71	PT. Dwi Tunggal Kusumo	UPPHN-3275030-001	I	Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan

72	PT. Hero Supermarket Tbk (Hero Kamala Lagoon/Lagoon Avenue Mall)	UR-3275050-119	I	Ritel
73	PT. Nuzaik Sinergi Perdana (2019)	CS-3275011-010	III	Gudang Berpendingin
74	PT. HAVI INDONESIA	CS-3275061-032	I	Gudang Berpendingin
75	PT. HAVI INDONESIA	GK-3275061-029	I	Gudang Kering
76	CV. FIVA FOOD & MEAT SUPPLY	UPD-3275010-012	IV	Usaha Pengolahan Daging
77	PT. HASTA NIAGA BERKAH	UPM-3275060-001	I	Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu
78	PT. INDO SPIRIT NATURA	GK-3275041-017	I	Gudang Kering
79	PT. ROYDE SUMBERDAYA MANDIRI	CS-3275030-024	I	Gudang Berpendingin
80	PT. Saung Mirwan	CS-3275030-025	I	Gudang Berpendingin
81	PT. CITRA NIAGA RAYA	GK-327507-0001	I	Gudang Kering
82	PT. MULTIRASA NUSANTARA	UPD-327503-0001	I	Usaha Pengolahan Daging
83	PT. ULTRA SAKTI	UPM-327507-0002	I	Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu
84	PT. LION SUPER INDO (Prima Harapan Regency)	Ritel-327503-0002	II	Ritel
85	PT. AGRO NUSA PROTINDO	UPD-327507-0003	I	Usaha Pengolahan Daging
86	PT BAROKAH MANDIRI BEEF	CS-	I	Gudang Berpendingin

*Sumber: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024*

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Unit usaha peternakan Kesehatan hewan dan produk hewan yang bersertifikat teknis yaitu :

- Selama tahun 2024 melaksanakan pembinaan higiene sanitasi dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
- Selama tahun 2024 karena ada peningkatan Jumlah pangan asal hewan yang beredar di Kota Bekasi mengalami peningkatan.
- Selama tahun 2024 terjadi peningkatan sarana prasarana seperti alat dan bahan uji yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan serta Keterbatasan sumber daya manusia teknis berlatar belakang dokter hewan dan paramedik yang akan bertindak sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner dan asisten pengawas kesehatan masyarakat veteriner.

#### 11. Indikato Program Persentase Produk PAH Yang ASUH

Tabel 3.30

Unit Usaha Peternakan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Bersertifikat Teknis di Kota Bekasi tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
	Persentase Produk PAH yang ASUH	persen	45,20	45,63%	100,95%

*Sumber: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024*

Indikator kinerja Persentase Produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat Utuh Dan Halal (ASUH) dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah produk pangan asal hewan yang diawasi selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah produk pangan asal hewan yang beredar di Kota Bekasi. Pengawasan dilakukan pada unit-unit produksi, penyimpanan dan distribusi produk pangan asal hewan. Pengawasan dilakukan sesuai standar hygiene sanitasi aspek kesehatan masyarakat veteriner. Persentase produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal berdasarkan pengawasan di pasar tradisional dan ritel sebesar 45,63%.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) ini yaitu :

- a) Melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan asal hewan di pasar tradisional dan pasar modern;
- b) Melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penerapan hygiene sanitasi pada unit-unit produksi, penyimpanan, dan distribusi produk pangan asal hewan, bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
- c) Melaksanakan pengambilan sampel pada unit usaha produk hewan sebagai bahan pemeriksaan terhadap kandungan residu antibiotika dan kandungan bakteri patogen di laboratorium Balai Veteriner Subang dan Laboratorium Diagnostik Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jawa Barat.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.31.** Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan Tahun 2023 Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2023	2024
1	Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan	persen	0	1.14%

*Sumber data : diolah Data Laporan Kinerja Tahunan DKPPP Kota Bekasi*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian terdapat peningkatan capaian kinerja dari 0% pada tahun 2023 menjadi 1,14% pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar 100%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Hasil Produksi Pertanian selama tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2023 dan tahun 2024

Serta tingkat efisiensi pengguna sumber daya untuk indikator kinerja sasaran persentase peningkatan hasil produksi pertanian

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023				ANGGARAN TAHUN 2024						
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	
				Rp	%				Rp	%			
3	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1	1.240.000.000	1.058.679.000	85,38	100	14,62	
		<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1	1.240.000.000	1.058.679.000	85,38	100	14,62	
		Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90	100	15,1	1.240.000.000	1.058.679.000	85,38	100	14,62	
		<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	379.045.000	349.972.000	92,33	100	7,67	300.000.000	286.944.150	95,65	100	4,35	
		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>379.045.000</b>	<b>349.972.000</b>	92,33	100	7,67	300.000.000	286.944.150	95,65	100	4,35	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	379.045.000	349.972.000	92,33	100	7,67	300.000.000	286.944.150	95,65	100	4,35	
		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>540.177.000</b>	<b>432.823.400</b>	<b>80,13</b>	<b>100</b>	<b>19,87</b>	<b>302.800.000</b>	<b>292.603.750</b>	<b>96,63</b>	<b>100</b>	<b>3,37</b>	
		<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	246.871.000	225.192.400	91,22	100	8,78	-	-	-	-	-	-
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	293.306.000	207.631.000	70,79	100	29,21	<b>302.800.000</b>	<b>292.603.750</b>	<b>96,63</b>	<b>100</b>	<b>3,37</b>	
		<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>278.149.000</b>	<b>261.731.000</b>	<b>94,10</b>	<b>100</b>	<b>5,9</b>	<b>187.220.000</b>	<b>174.139.750</b>	<b>93,01</b>	<b>100</b>	<b>6,99</b>	
		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci</b>	<b>34.420.000</b>	<b>33.610.000</b>	<b>97,65</b>	<b>100</b>	<b>2,35</b>	<b>37.220.000</b>	<b>34.292.500</b>	<b>92,13</b>	<b>100</b>	<b>7,87</b>	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	34.420.000	33.610.000	97,65	100	2,35	<b>37.220.000</b>	<b>34.292.500</b>	<b>92,13</b>	<b>100</b>	<b>7,87</b>	
		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>243.729.000</b>	<b>228.121.000</b>	<b>93,60</b>	<b>100</b>	<b>6,4</b>	<b>150.000.000</b>	<b>139.847.250</b>	<b>93,23</b>	<b>100</b>	<b>6,77</b>	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.729.000	228.121.000	93,60	100	6,4	<b>150.000.000</b>	<b>139.847.250</b>	<b>93,23</b>	<b>100</b>	<b>6,77</b>			

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023				ANGGARAN TAHUN 2024					
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
3	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	2.572.912.447	1.008.525.500	39.2	100	60.8	1.750.000.100	1.625.501.260	92.89	100	7.11
		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	1.091.319.100	174.575.000	16	100	84	160.119.100	156.101.100	97.49	100	2.51
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	961.319.000	94.575.000	9.84	100	90.16	160.119.100	156.101.100	97.49	100	2.51
		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.234.823.347	744.809.500	60.32	100	39.68	1.312.081.000	1.237.693.810	94.33	100	5.67
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	827.373.500	744.809.500	90.02	100	9.98	80.731.000	29.100.000	36.05	100	63.95
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	407.449.847	0	0	100	100	1.231.350.000	1.203.593.810	98.15	100	1.85
		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	147.320.000	57.132.000	38.78	100	61.22	100.000.000	88.641.000	88.64	100	11.36
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	147.320.000	57.132.000	38.78	100	61.22	100.000.000	88.641.000	88.64	100	11.36
		<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	99.450.000	32.009.000	32,19	100	67.81	75.000.000	47.791.350	63.72	100	36.28
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	99.450.000	32.009.000	32.19	100	67.81	75.000.000	47.791.350	63.72	100	36.28
		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	-	-	-	-	-	102.800.00	95.274.000	92.68	100	7.32
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	-	102.800.00	95.274.000	92.68	100	7.32

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022				ANGGARAN TAHUN 2023					
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%				Rp	%		
		<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	863.539.500	823.427.500	95,35	100	4,65	365.751.000	326.120.686	89.16	100	10.84
		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	245.446.500	239.775.500	97,69	100	2,31	248.246.500	212.207.500	85.48	100	14.52
		Pemberantasan Penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	248.246.500	212.207.500	85.48	100	14.52
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	245.446.500	239.775.500	97,69	100	2,31	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	92.746.000	84,31	100	15,69	-	-	-	-	-
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	110.000.000	92.746.000	84,31	100	15,69	-	-	-	-	-
		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	508.093.000	490.906.000	96,62	100	3,38	117.504.500	113.913.186	96.94	100	3.06
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	133.093.000	120.598.000	90,61	100	9,39	117.504.500	113.913.186	96.94	100	3.06
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	370.308.000	370.308.000	98,75	100	1,25	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan, dimana pagu anggaran pada Program Penanganan Kerawanan Pangan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp1.240.000.000,00 (*satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.058.679.000,00 (*satu milyar lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 85.38% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Program Pengawasan Keamanan Pangan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp300.00.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp286.944.150,00 (*dua ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk penyediaan sarana pengujian keamanan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 95.65% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp302.800.000,00 (*tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp292.603.750,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 96.63% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp187.220.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.174.139.750,00 (*seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala

mikro dan kecil, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 93.01% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

selanjutnya pagu anggaran pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp 1.750.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.625.501.260,00 (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*), yang mana dari serapan anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pelatihan hidroponik, pemanfaatan sumber daya genetic hewan/tanaman, pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/tanaman skala kecil dan pemeriksaan mutu dan keamanan peredaran obat hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan peredaran hewan dan produk hewan. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 92,92% dalam mendukung capaian indikator kinerja peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp365.751.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.326.120.686,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*), dari serapan anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis serta pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 89.16% dalam mendukung capaian indikator kinerja inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Jika dikaitkan dengan realisasi peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan sebesar 1.14% dari target sebesar 1.14% atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, serta serapan anggaran sebesar 99.92%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 7.07%, dan terdapat sisa anggaran yang cukup besar, namun begitu capaian kinerja sudah mencapai target.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33  
Perbandingan Realisasi Kinerja indikator kinerja Peningkatan persentase konsumsi rumah tangga sektor makanan Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENINGKATAN PERSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA SEKTOR MAKANAN	
		2024	2025
Target	%	1,14	1,15
Realisasi	%	1,14	0

Sumber data : Renstra 2024-2026 DKPPP Kota Bekasi, diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sasaran indikator kinerja Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan terdapat realisasi kinerja dari 1,14% pada tahun 2024, sedangkan target kinerja pada tahun 2025 sebesar 1,15%. oleh sebab itu DKPPP harus lebih meningkatkan capaian atas indikator kinerja Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan yang sudah diraih saat ini serta melakukan perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pencapaian indikator kinerja Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan secara optimal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan pangan;
2. Meningkatkan penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pasangan asal tumbuhan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan, pengujian mutu dan keamanan pangan segar.
4. Memaksimalkan teknologi pertanian dalam penggunaannya;
5. Pelatihan untuk tenaga penyuluh dan petani;
6. Memaksimalkan pengawasan peredaran obat2 hewan dan pertanian;
7. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman.
8. Melakukan edukasi kepada peternak, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi peternakan;
9. Melakukan monitoring dan pelayanan kesehatan hewan;
10. Melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil melalui : pelatihan inovasi dan teknologi budidaya ikan konsumsi, pelatihan pembuatan pakan ikan(mandiri), bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele;
11. Pelatihan bagi pembudidaya ikan konsumsi dan ikan hias.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) sebesar Rp. 4.646.867.340,00,- (*empat milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar 4.243.262.846,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) atau 92,62%. sedangkan Untuk menunjang pelaksanaan kinerja didukung dengan anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) sebesar Rp. 16.643.804.960,00,- (*enam belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar 13.817.849.544,00 (*tiga belas milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) atau 83,02%. berikut rincian dalam tabel :

Tabel 3.34

## Realisasi Belanja Langsung Urusan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	SUMBER DANA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	150.000.000,00	501.096.240,00	479.274.250,00	95.65	DBH, DBHCT
	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100	DBH, DBHCT
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100	DBH, DBHCT
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	150.000.000,00	401.096.240,00	379.274.250,00	94.56	DBH, DBHCT
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000,00	401.096.240,00	379.274.250,00	94.56	DBH, DBHCT
2	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	1.340.000.000,00	1.240.000.000,00	1.058.679.000,00	85.38	DTU, DBH
	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	1.058.679.000,00	85.38	DTU, DAU
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	1.058.679.000,00	85.38	DTU, DAU
3	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	286.944.150,00	95.65	DTU, DAU
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	300.000.000,00	300.000.000,00	286.944.150,00	95.65	DTU, DAU
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	286.944.150,00	95.65	DTU, DAU
4	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	302,800,000.00	302,800,000.00	292.603.750,00	96.63	DTU, DBH
	<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	302,800,000.00	302,800,000.00	292.603.750,00	96.63	DTU, DBH
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	302,800,000.00	302,800,000.00	292.603.750,00	96.63	DTU, DBH
5	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	187.220.000,00	187.220.000,00	174.139.750,00	93.01	DTU, DBH, DAU
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci</b>	37,220,000.00	37,220,000.00	34.292.500,00	92.13	DTU, DBH,DAU
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	37,220,000.00	37,220,000.00	37,220,000.00	37,220,000.00	37,220,000.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	150,000,000.00	150,000,000.00	139.847.250,00	93.23	DTU, DBH,DAU
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	150,000,000.00	139.847.250,00	93.23	DTU, DBH,DAU
6	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	1,607,769,100.00	1,750,000,100.00	<b>1.625.501.260,00</b>	<b>92.89</b>	<b>DTU,DBH,DAK</b>
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	98,619,100.00	160,119,100.00	<b>156.101.100,00</b>	<b>97.49</b>	<b>DTU,DBH,DAK</b>
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	98,619,100.00	160,119,100.00	<b>156.101.100,00</b>	<b>97.49</b>	<b>DTU,DBH,DAK</b>
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1,231,350,000.00	1,312,081,000.00	<b>1.237.693.810,00</b>	<b>94.33</b>	<b>SILPA BANDEK</b>
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0.00	80,731,000.00	29.100.00	36.05	<b>SILPA BANDEK</b>
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1,231,350,000.00	1,231,350,000.00	1.208.593.810,00	98.15	<b>DTU,DBH,BANDEK</b>
	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100,000,000.00	100,000,000.00	<b>88.641.000,00</b>	<b>88.64</b>	<b>DTU,DBH</b>
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100,000,000.00	100,000,000.00	88.641.000,00	88.64	<b>DTU,DBH</b>
	<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	75.000.000	75.000.000	<b>47.7791.350,00</b>	<b>63.72</b>	<b>DTU,DBH</b>
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	75.000.000	75.000.000	<b>47.7791.350,00</b>	<b>63.72</b>	<b>DTU,DBH</b>
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	102,800,000.00	102,800,000.00	95.274.000,00	92.68	<b>DTU,DBH</b>
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	102,800,000.00	102,800,000.00	95.274.000,00	92.68	<b>DTU,DBH</b>
7	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	365,751,000.00	365,751,000.00	<b>326.120.686,00</b>	<b>89.16</b>	<b>DTU,DBH</b>
	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	248,246,500.00	248,246,500.00	<b>212.207.500,00</b>	<b>85.48</b>	<b>DTU,DBH</b>
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	248,246,500.00	248,246,500.00	212.207.500	85.48	<b>DTU,DBH</b>
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	117,504,500.00	117,504,500.00	113.913.186	96.94	<b>DTU,DBH</b>
	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	117,504,500.00	117,504,500.00	113.913.186	96.94	<b>DTU,DBH</b>
	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>DTU,DBH</b>
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>DTU,DBH</b>
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	365,751,000.00	365,751,000.00			<b>DTU,DBH</b>

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2024,diolah

### 3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN DKPPP TAHUN 2024

Untuk mengetahui persentase tingkat *effectiveness* harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam keputusan menteri dalam negeri No. 690.900-327 tahun 1996 dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

1. Apabila dari hasil pembagian tersebut di atas 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya 80% sampai 90%, maka dapatdiartikan cukup efektif.
4. Apabila pembagian tersebut hasilnya di angka 60% sampai 80%, dapatdiartikan kurang efektif.
5. Apabila pembagian tersebut hasilnya di bawah 60%, diartikan tidak efektif.

Tabel 3.35

#### Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Lebih/ (Kurang)
			(Rp)	%	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>18.061.112.390,00</b>	<b>84,83</b>	<b>(3.229.559.910,00)</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>17.981.212.390,00</b>	<b>84,79</b>	<b>(3.225.679.910,00)</b>
	Belanja Pegawai	12.370.693.000,00	10.015.099.134,00	80,96	(2.355.593.866,00)
	Belanja Barang dan Jasa	8.836.199.300,00	7.966.113.256,00	90,15	(870.086.044,00)
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>83.780.000,00</b>	<b>79.900.000,00</b>	<b>95,37</b>	<b>(3.880.000,00)</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.780.000,00	79.900.000,00	95,37	(3.880.000,00)

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA Tahun 2024, diolah

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagaiberikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{18.061.112.390}{21.290.672.300} \times 100\% = 84.83\%$$

Adapun rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Belanja 2024	Realisasi Belanja 2024	%	Kriteria Efektivitas
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>18.061.112.390,00</b>	<b>84,83</b>	Efektif
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>17.981.212.390,00</b>	<b>84,79</b>	Efektif
Belanja Pegawai	12.370.693.000,00	10.015.099.134,00	80,96	Efektif
Belanja Barang dan Jasa	8.836.199.300	7.966.113.256,00	90,15	Efektif
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>83.780.000,00</b>	<b>79.900.000,00</b>	<b>95,37</b>	Efektif
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.780.000,00	79.900.000,00	95,37	Efektif

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran DKPPP tahun 2024 sebesar 84,83%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Efektif”. Adapun sisa anggaran DKPPP tahun 2024 adalah sebesar Rp3.229.559.910,00

Guna menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan realisasi dengan anggaran belanja dinas. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan persentase antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan persentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Adapun rumus perhitungan efisiensi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan persentase di atas

- 100%, maka artinya tidak efisien.
2. Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien.
  3. Apabila hasil dari perhitungan tersebut di angka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
  4. Apabila hasil perhitungan tersebut di angka 60% sampai 80%, artinya efisien.
  5. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka di bawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{18.061.112.390}{21.290.672.300} \times 100\% = 84,83\%$$

Adapun rasio efisiensi anggaran DKPPP yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Belanja 2024	Realisasi Belanja 2024	%	Kriteria Efisiensi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>18.061.112.390,00</b>	<b>84,83</b>	<b>Cukup Efisien</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.290.672.300,00</b>	<b>17.981.212.390,00</b>	<b>84,79</b>	<b>Cukup Efisien</b>
Belanja Pegawai	12.370.693.000,00	10.015.099.134,00	80,96	<b>Cukup Efisien</b>
Belanja Barang dan Jasa	8.836.199.300	7.966.113.256,00	90,15	<b>Cukup Efisien</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>83.780.000,00</b>	<b>79.900.000,00</b>	<b>95,37</b>	<b>Cukup Efisien</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.780.000,00	79.900.000,00	95,37	<b>Cukup Efisien</b>

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efisiensi, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran DKPPP tahun 2024 sebesar 84,83%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “cukup efisien”. Adapun sisa anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar Rp3.229.559.910,00

#### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 3 (tiga) indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian Kinerja ini akan kami tingkatkan oleh seluruh aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Sehingga Sasaran Strategis dan Tujuan strategis Kota Bekasi dapat terwujud.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

#### 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan

capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan Pangan, urusan Pertanian serta urusan Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing;
3. Memperbaiki dan menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan;
4. Menjalin kerja sama dengan instansi lain (stakeholder) dalam pelaksanaan program-program DKPPP dan melakukan upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Bekasi, Januari 2025

Herbert S W Panjaitan  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi

